

IMPLEMENTASI KARTU JAWA TENGAH SEJAHTERA (KJTS) DI KECAMATAN BOJA KABUPATEN KENDAL TAHUN 2020-2022

Dito Arya Ramadhani, Dzunuwanus Ghulam Manar, S.IP., M.Si., Drs. Yuwanto, M.Si., Ph.D

Departmen Politik dan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,

Universitas Diponegoro

Jln. Prof. Soedarto, S.H., Tembalang, Semarang, Kotak Pos 1269

Telepon (024) 7465407, Faksimile (024) 7465405

Laman: www.fisip.undip.ac.id email: fisip@undip.ac.id

ABSTRACT

The number of poor people in Kendal Regency exceeded 8 thousand people, indicating the magnitude of the poverty problem in the area. Central Java Governor Regulation Number 40 of 2017 showed seriousness in overcoming poverty and helping those who were unproductive through the implementation of the Central Java Prosperous Card (KJTS). This research was conducted to understand the implementation of the KJTS policy in Kendal Regency, using George Edward III's theory which included aspects of communication, resources, disposition, and bureaucratic structure.

Data was collected through interviews, and qualitative data analysis was carried out by data triangulation. The subjects in this research were the Boja District Government, Kendal Regency Social Service employees and Central Java Province Social Service employees.

The research results showed that the implementation of KJTS in Kendal Regency could be used as a model of accuracy and effectiveness in the distribution of social assistance. This program placed emphasis on comprehensive verification and validation procedures, as well as utilized data analysis through the Integrated Social Welfare Data system. This ensured a targeted approach in beneficiary selection. By responding to the needs of individuals with special conditions and encouraging inclusivity through proposals from underserved villages, KJTS showed a commitment to reaching those who truly needed help.

Keywords: Policy Implementation, Effectiveness, Prosperous Central Java Card (KJTS), Kendal Regency, Poverty.

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Provinsi Jawa Tengah merupakan salah satu wilayah di Indonesia yang masih dihuni oleh masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan (Wahyudi & Tri, 2013). Pada tahun 2020, jumlah penduduk Jawa Tengah yang hidup di bawah garis kemiskinan mencapai 3.989,90 ribu jiwa, dengan angka ini mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2022, angka kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah meningkat menjadi 4.109,75 jiwa. Selama periode 2019 hingga 2021, tingkat kemiskinan penduduk Provinsi Jawa Tengah secara keseluruhan mencapai 11,79 persen.

Salah satu strategi yang dianggap efektif dalam mengatasi kemiskinan adalah melalui diperkenalkannya Kartu Jawa Tengah Sejahtera, sebuah inisiatif kebijakan yang menjadi pionir dalam upaya pengentasan kemiskinan. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pengentasan Kemiskinan, berupaya menanggulangi kemiskinan secara efektif dan berkelanjutan melalui pendekatan yang terfokus dan menyeluruh, melibatkan tingkat pemerintahan nasional dan daerah. Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2017 digunakan untuk memberikan Bantuan Jaminan Sosial bagi Masyarakat Miskin Tidak Produktif melalui Kartu Jateng Sejahtera.

Kabupaten Kendal menjadi prioritas dalam penanggulangan

kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah. Pada tahun 2021, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Kendal mencapai 409.193 jiwa, menurut data dari situs resmi Pemkab Kendal. Namun, terdapat kesenjangan yang signifikan antara jumlah penduduk miskin dan penerima Kartu Jateng Sejahtera di wilayah tersebut, dengan hanya 47 orang yang menjadi penerima kartu. Faktor-faktor seperti masalah administratif, tantangan dalam identifikasi penerima yang memenuhi syarat, dan masalah dalam proses distribusi bisa menjadi penyebab kesenjangan tersebut. Oleh karena itu, penting untuk melakukan kajian lebih lanjut guna mengidentifikasi akar penyebab kesenjangan dan potensi perbaikan dalam pelaksanaan program Kartu Jateng Sejahtera di Kabupaten Kendal. Selain itu, perlu dilakukan evaluasi komprehensif terhadap pelaksanaan program, termasuk penilaian terhadap kriteria yang digunakan untuk menentukan kelayakan, proses distribusi, dan tantangan yang dihadapi pemerintah daerah dalam melaksanakan program.

Pemilihan Kecamatan Boja Kabupaten Kendal sebagai lokasi penelitian dilatarbelakangi oleh tingginya angka kemiskinan di daerah tersebut dan kesenjangan antara jumlah penduduk miskin dan penerima Kartu Jateng Sejahtera. Dengan jumlah penduduk miskin yang besar, Kabupaten Kendal memerlukan upaya pengentasan kemiskinan yang efektif, sebagaimana tercermin dalam komitmen penanggulangan kemiskinan melalui Kartu Jateng Sejahtera. Kesenjangan antara jumlah penduduk

miskin dan terbatasnya penerima Kartu Jateng Sejahtera menunjukkan adanya potensi permasalahan dalam pelaksanaan program tersebut. Oleh karena itu, investigasi dan evaluasi menyeluruh diperlukan untuk mengatasi kesenjangan ini dan memastikan bahwa program tersebut efektif dalam menjangkau penerima manfaat sesuai dengan peraturan yang berlaku. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian dilakukan untuk menganalisis implementasi lapangan terkait program Kartu Jawa Tengah Sejahtera, khususnya di Kabupaten Kendal, guna mengidentifikasi kemajuan dalam pelaksanaan kebijakan tersebut.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi kebijakan Kartu Jawa Tengah Sejahtera (KJTS) di Kabupaten Kendal?
2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat implementasi Kartu Jawa Tengah Sejahtera (KJTS) di Kecamatan Boja?

Tujuan Penelitian

1. Mengidentifikasi implementasi kebijakan Kartu Jawa Tengah Sejahtera (KJTS) di Kabupaten Kendal.
2. Mengidentifikasi hal-hal yang mendukung dan menghambat implementasi Kartu Jawa Tengah Sejahtera (KJTS) di Kecamatan Boja.

Kerangka Teori

Kebijakan Publik

Kebijakan publik mencakup serangkaian pilihan atau taktik yang disengaja yang dirancang oleh individu atau kolektif dengan tujuan mencapai tujuan masyarakat tertentu. Biasanya badan atau lembaga pemerintahlah yang bertanggung jawab dalam merumuskan kebijakan publik tersebut (Taufiqurokhman, 2014). Kebijakan, sebagaimana dijelaskan oleh Winarno (2004), adalah rencana tindakan yang diusulkan oleh individu, kelompok, atau pemerintah dalam lingkungan tertentu. Jalur tindakan ini menimbulkan masalah dan kemungkinan, dengan tujuan mencapai tujuan tertentu. Kebijakan publik memberikan pengaruh yang besar terhadap individu, sebagaimana dikemukakan oleh Gerston (dikutip dalam Fadhillah, 2022), yang menyoroti bahwa pejabat pemerintah di semua tingkatan memanfaatkan kebijakan publik untuk mengatasi permasalahan publik.

Implementasi Kebijakan Publik

Teori Implementasi Kebijakan George Edward III menekankan pentingnya fase implementasi sebagai jembatan antara pembuatan kebijakan dan dampaknya terhadap masyarakat yang terpengaruh. Langkah-langkah implementasi dianggap krusial karena meskipun kebijakan telah dirumuskan dengan baik, tanpa perencanaan dan persiapan yang matang, tujuan kebijakan publik tidak akan tercapai. Sebaliknya, jika kebijakan itu sendiri tidak disusun dengan baik, maka persiapan dan perencanaan yang matang untuk implementasi juga

mungkin akan sia-sia. Oleh karena itu, penting untuk mempersiapkan dan merencanakan desain serta implementasi kebijakan secara cermat dan menyeluruh untuk mencapai tujuan kebijakan (Nurani, 2009).

Dalam pendekatan yang diperkenalkan oleh George Edward III (Nurani, 2009), terdapat empat variabel yang sangat menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan, yaitu komunikasi, sumber daya, struktur birokrasi, dan disposisi.

- a) Komunikasi sangat penting karena mencakup transfer informasi, ide, keterampilan, aturan, dan faktor terkait lainnya kepada pihak-pihak yang terlibat. Proses komunikasi harus tepat dan dipahami secara menyeluruh oleh para pelaksana, dengan instruksi yang jelas menjadi kunci dalam implementasi kebijakan yang efektif.
- b) Sumber daya manusia memainkan peran penting dalam melaksanakan kebijakan, dengan keberhasilan implementasi yang bergantung pada keberadaan jumlah orang yang kompeten dalam jumlah yang cukup.
- c) Struktur birokrasi menjadi faktor krusial dalam menjalankan kebijakan, dengan peranannya dalam memilih struktur organisasi untuk mengatasi permasalahan sosial. Standar proses kerja atau SOP dan kecenderungan fragmentasi

adalah dua karakteristik utama birokrasi yang mempengaruhi implementasi kebijakan.

- d) Disposisi para pelaksana kebijakan menjadi aspek penting karena efisiensi dalam implementasi membutuhkan pemahaman yang komprehensif akan tugas dan kapasitas untuk melaksanakannya secara tidak memihak dalam praktiknya.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, jenis dan sumber data yang digunakan mencakup data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung dari informan kepada peneliti melalui wawancara dan observasi tanpa perantara. Sedangkan data sekunder merupakan informasi yang tidak diperoleh langsung dari sumber, melainkan melalui dokumen, jurnal, laporan, artikel, atau bahan bacaan lain yang relevan dengan topik penelitian (Sugiyono, 2018).

Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi wawancara, observasi, dan dokumentasi. Wawancara terstruktur dilakukan untuk mendapatkan informasi tentang sebaran Kartu Jateng Sejahtera di Kabupaten Kendal dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kesenjangan distribusi. Observasi dilakukan untuk mengamati langkah-langkah yang diambil oleh petugas Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah dan Dinas Sosial Kabupaten Kendal dalam menanggapi keluhan warga terkait

pembagian Kartu Jateng Sejahtera. Sedangkan dokumentasi melibatkan pencatatan data yang sudah ada sebelumnya secara sistematis, seperti laporan anggaran, data penerima manfaat, dan dokumen terkait kebijakan dan prosedur operasional (SOP) dari kedua dinas tersebut.

Dalam analisis data, penelitian menggunakan teknik triangulasi data Miles Huberman yang meliputi pengumpulan data dari berbagai sumber, analisis mendalam dengan membandingkan data dari sumber yang berbeda, dan interpretasi hasil untuk mengidentifikasi temuan utama, pola, dan hubungan antarvariabel. Hal ini dilakukan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif tentang implementasi Kartu Jawa Tengah Sejahtera di Kecamatan Boja Kabupaten Kendal selama periode 2020-2022, serta menyumbangkan kontribusi pada pemahaman terkait kebijakan tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kebijakan Kartu Jawa Tengah Sejahtera (KJTS) Di Kabupaten Kendal

Hasil dari penerapan Kartu Jawa Tengah Sejahtera (KJTS) di Kabupaten Kendal dapat dirangkum sebagai berikut:

Prosedur Verifikasi dan Validasi Kartu Jawa Tengah Sejahtera

- a) Penekanan pada prosedur verifikasi dan validasi yang

ketat untuk memastikan keakuratan penyaluran bantuan sosial.

- b) Penggunaan sistem Data Terpadu Kesejahteraan Sosial untuk mengautentikasi informasi dari calon penerima.
- c) Verifikasi yang cermat bertujuan memastikan bahwa penerima tidak menerima bantuan lain dari pemerintah, dengan referensi silang dan otentikasi menyeluruh.

Pengusulan Calon Penerima Bantuan Kartu Jawa Tengah Sejahtera

- a) Pendekatan strategis dalam pengusulan calon penerima, dengan mempertimbangkan berbagai faktor seperti kebutuhan khusus, penyakit kronis, dan tingkat produktivitas.
- b) Desa-desa yang tidak memiliki akses terhadap bantuan sosial diwajibkan untuk mengajukan proposal, untuk meningkatkan efektivitas program dan memastikan keseimbangan antara pemberdayaan daerah dan kepatuhan terhadap kebijakan pemerintah pusat.

Penerima Jaminan Bantuan Kartu Sosial Jawa Tengah Sejahtera

- a) Penyaluran bantuan kepada penerima terpilih yang berhasil memenuhi kriteria kelayakan dan dianggap membutuhkan bantuan berdasarkan proses verifikasi dan pengusulan.

- b) Komitmen program terhadap keakuratan dan keadilan tercermin dalam proses validasi yang ketat, memastikan bahwa bantuan menjangkau individu yang menghadapi beragam kondisi, termasuk mereka yang berkebutuhan khusus atau penyakit kronis.

Penyaluran Kartu Jawa Tengah Sejahtera

- a) Distribusi kartu dilakukan dengan metodologi yang terorganisir baik dan fleksibel, memastikan efisiensi dalam pendistribusian.
- b) Komitmen program terhadap transparansi dan akuntabilitas terlihat dalam responsnya terhadap perubahan kebijakan dan alokasi sumber daya, dengan memastikan bahwa bantuan sampai kepada pihak yang paling membutuhkan.

Dengan demikian, penerapan Kartu Jawa Tengah Sejahtera di Kabupaten Kendal menunjukkan komitmen yang kuat dalam memastikan penyaluran bantuan sosial yang tepat sasaran, efisien, dan adil kepada mereka yang benar-benar membutuhkan.

2. Faktor Pendukung Dan Penghambat Kartu Jawa Tengah Sejahtera (KJTS) Di Kecamatan Boja

Mengenai Faktor Pendukung dan Penghambat Penyelenggaraan Kartu Jawa Tengah Sejahtera (KJTS) di

Kabupaten Boja, dapat dirangkum poin-poin penting sebagai berikut:

Faktor Pendukung

- a) Sistem Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (TKSK) menunjukkan efektivitas dengan pendekatan sistematisnya dalam mengidentifikasi dan memvalidasi calon penerima, memastikan tepat sasaran bantuan sosial.
- b) Kolaborasi antara pemerintah daerah dan lembaga keuangan, seperti Bank Jateng, menyederhanakan proses komunikasi dan dokumentasi, sehingga berkontribusi terhadap keberhasilan program.
- c) Komitmen program dalam memberikan bantuan kepada penerima bantuan berkebutuhan khusus, termasuk Penyandang Disabilitas (ODGJ) dan mereka yang memiliki kondisi kesehatan mental, terlihat dari kemampuan adaptasinya dalam memberikan dukungan kepada keluarga mereka ketika penyaluran langsung menghadapi kendala praktis.

Faktor Penghambat

- a) Keterlambatan dalam distribusi, terutama ketika penerima manfaat, termasuk mereka yang berkebutuhan khusus, harus mengunjungi bank secara langsung, merupakan hambatan yang signifikan, menyebabkan

frustrasi dan menghambat pelaporan tepat waktu.

- b) Penekanan program pada pemberian bantuan tunai kepada individu yang kurang produktif menimbulkan kekhawatiran tentang inklusivitas dan potensi keterbatasan dalam mendorong pemberdayaan dan pengembangan keterampilan.
- c) Kekurangan personel departemen layanan sosial, ditambah dengan kekhawatiran mengenai ketersediaan ruang kantor yang memadai, dapat mengurangi kapasitas departemen untuk menangani beban kerja dan menjalankan program secara efektif.

PENUTUP

Kesimpulan

Dari hasil penerapan Kartu Jawa Tengah Sejahtera (KJTS) di Kabupaten Kendal, dapat disimpulkan bahwa prosedur verifikasi dan validasi kartu menjadi fokus utama dalam memastikan keakuratan dan efisiensi penyaluran bantuan sosial. Dengan menggunakan sistem Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, verifikasi dilakukan secara cermat untuk memastikan bahwa penerima benar-benar memenuhi kriteria kelayakan dan tidak menerima bantuan lain dari pemerintah. Pengusulan calon penerima juga dilakukan secara strategis dengan mempertimbangkan berbagai faktor seperti kebutuhan khusus, sehingga memastikan program

menjangkau mereka yang benar-benar membutuhkan.

Selain itu, penyelenggaraan program KJTS di Kabupaten Kendal menunjukkan komitmen yang kuat terhadap keakuratan, keadilan, dan transparansi dalam penyaluran bantuan sosial. Distribusi kartu dilakukan dengan metodologi yang terorganisir baik, sementara respons terhadap perubahan kebijakan dan alokasi sumber daya menunjukkan komitmen terhadap peningkatan efisiensi dan efektivitas program. Dengan demikian, program ini berhasil menunjukkan dedikasinya untuk memberikan bantuan kepada mereka yang benar-benar membutuhkan secara tepat sasaran.

Di sisi lain, dalam konteks implementasi KJTS di Kabupaten Boja, terdapat faktor pendukung dan penghambat yang perlu diperhatikan. Sistem Data Terpadu Kesejahteraan Sosial dan kolaborasi antara pemerintah daerah dengan lembaga keuangan menjadi faktor pendukung utama. Namun, keterlambatan distribusi, penekanan pada pemberian bantuan tunai kepada individu kurang produktif, dan kekurangan personel departemen layanan sosial menjadi tantangan yang perlu diatasi untuk meningkatkan efektivitas program secara keseluruhan.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian maka saran yang dapat diberikan adalah:

- a. Pemerintah dapat menciptakan sistem distribusi alternatif yang lebih efisien dan inklusif dapat

- mengatasi keterlambatan, terutama bagi penerima manfaat yang kesulitan mengunjungi bank secara langsung. Pilihan seperti layanan pengiriman atau loket distribusi di tingkat lokal dapat meminimalkan hambatan fisik dan memberikan kemudahan akses bagi semua penerima manfaat, termasuk mereka yang berkebutuhan khusus.
- b. Pemerintah dapat mengembangkan platform pelaporan online dan mobile dapat meningkatkan ketepatan waktu pelaporan. Dengan memanfaatkan teknologi digital, penerima manfaat, termasuk mereka yang kesulitan bergerak, dapat melaporkan kondisi mereka tanpa harus mengunjungi bank secara langsung. Hal akan mengurangi frustrasi dan mempercepat proses distribusi, menciptakan sistem yang lebih responsif dan inklusif.
 - c. Untuk mengatasi keterbatasan dalam pendekatan bantuan, pertimbangkan untuk meningkatkan inklusivitas program KJTS dengan memasukkan langkah-langkah yang mendorong pemberdayaan dan pengembangan keterampilan di antara penerima manfaat. Melaksanakan program atau inisiatif pelatihan yang ditargetkan yang bertujuan untuk meningkatkan produktivitas penerimanya, selaras dengan tujuan kemajuan sosial dan ekonomi yang lebih luas. Hal ini dapat melibatkan kolaborasi dengan lembaga-lembaga pendidikan, pusat pelatihan

kejuruan, atau dunia usaha lokal untuk memberikan peluang pengembangan keterampilan dan lapangan kerja, sehingga mengatasi potensi hambatan dalam memfokuskan hanya pada bantuan tunai bagi individu yang kurang produktif.

DAFTAR PUSTAKA

Artikel

- Badan Pusat Statistik. (2022). *Persentase Penduduk Miskin Maret 2022 turun-menjadi-9-54-Persen*, [https://www.bps.go.id/\(2022,Jul,15\)/persentase-penduduk-miskin-maret-2022-turun-menjadi-9-54-persen](https://www.bps.go.id/(2022,Jul,15)/persentase-penduduk-miskin-maret-2022-turun-menjadi-9-54-persen). Jumlah penduduk miskin 20 persen pada 20 Maret 2022, diakses pada 13 November 2022 Pukul 20.00.
- Biro Humas Provinsi Jawa Tengah. (2021). *Penanggulangan Kemiskinan di Kendal Masih Perlu Digenjot*, <https://jatengprov.go.id/penanggulangan-kemiskinan-di-kendal-masih-perlu-digenjot/>, diakses pada 13 November 2022 Pukul 20.10
- Diskominfo Provinsi Jawa Tengah. (2023). *Kartu Jateng Sejahtera Sukses, Besaran Bantuan Ditambah*. Retrieved from Portal Resmi Provinsi Jawa Tengah: <https://jatengprov.go.id/publik/kartu-jateng-sejahtera-sukses-besaran-bantuan-ditambah/>,

diakses pada 13 April 2023
pukul 20.00

Kusnandar, V. B. (2022, Agustus,08).
Tingkat Kemiskinan dan
Pengangguran Indonesia
(Kuartal I 2017 – Kuartal I
2022) Dipetik September 24,
2022, dari
databoks.katadata.co.id :
[https://databoks.katadata.co.id/
2022/01/17/angka-kemiskinan
indonesia-turun-jadi-971-pada-
september-2021](https://databoks.katadata.co.id/2022/01/17/angka-kemiskinan-indonesia-turun-jadi-971-pada-september-2021)

Buku

- Alexander, P. (2009). *Negara Kesejahteraan dan Sosial Demokrasi*. Jakarta: Friedrich-Ebert-Stiftung.
- Gerston, L, N. (1992). *Public Policy Making in A Democratic society: A Guide to CIVIC Engaagement*. New York: M.E Sharp, p.5.
- Hardani. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Yogyakarta: CV Pustaka Ilmu.
- Iskandar, M. (2021). *Negara dan Politik Kesejahteraan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Moloeng, L. J. (2010). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Mustari, N. (2015). *Pemahaman Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi Dan Evaluasi Kebijakan Publik*. 46-57.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Setiyono, B. (2018). *Model dan Desain Negara Kesejahteraan*. Semarang: Undip Press.

Taufiqurokhman, M. (2014). *Pendelegasian Tanggung Jawab Negara Kepada Presiden Selaku Penyelenggara Pemerintah*. Kebijakan Publik, 2.

Winarno, B. (2004). *Teori dan proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta. Media Pressindo. 195-198

Jurnal

- Azkiya, M. E.(2017). Analisis Implementasi Kebijakan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Pasal 21 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Selama Bekerja di Luar Negeri. *Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik*, 5.
- Anggleni, A. (2018). Implementasi Kebijakan Program Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Miskin di Kelurahan Sekip Jaya Kecamatan Kemuning Kota Palembang. *Jurnal Ilmu Administrasi dan Studi Kebijakan*, 1(1).
- Barlinta, Y. S. (2007). Kebijakan Kebijakan Pemerintah Dalam Penanggulangan Kemiskinan. 158-160.
- Buyung, D. A. (2016). Implementasi Kebijakan Kemiskinan Melalui Kur Mikro. *Jurnal Administrasi Publik*, 44-45

- Ernawati, K., Fadilah, M. R., Rachman, M. A., Nadira, C., Sartika, P. A. J., Jannah, F., & Komalasari, R. (2022). Implementasi Kebijakan Program Pengendalian Demam Berdarah Dengue di Puskesmas Kresek, Kabupaten Tangerang. *Public Health and Safety International Journal*, 2(02), 140-145.
- Hadiyono, V. (2020). Indonesia dalam Menjawab Konsep Negara *Welfare State* dan Tantangannya. *Jurnal Hukum Politik dan Kekuasaan*, 1(1), 23-33.
- Karim, M. F. (2017). Liberal World Order in the Age of Disruptive Politics: A Southeast Asian Perspective. *Journal of Asean Studies*, 5(1).
- Kristian, I. (2022). Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan Di Kecamatan Pamulihan Kabupaten Garut. *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, 9(1), 23-37.
- Nurahmawati, F., & Hartini, S. (2020). Implementasi kebijakan program bantuan langsung tunai (BLT) terhadap warga terdampak Covid-19 di desa Cibadak. *JURMA: Jurnal Program Mahasiswa Kreatif*, 4(2), 160-165.
- Nurani, D. (2009). Analisis Implementasi Kebijakan Bantuan Operasional Sekolah Pada Sekolah Dasar di Jakarta Selatan. 1-13
- Mustari, N.(2015). Pemahaman Kebijakan Publik Formulasi , Implementasi Dan Evaluasi Kebijakan Publik. 46-57.
- Nastia, (2014). Implementasi Perda No. 02 Tahun 2004 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Baubau (Studi Penggunaan Lahan dalam Pengembangan Wilayah. *Journal Of Governance And Public Policy*, 1(1).
- Putra, B. K. (2022). Kontribusi Negara dan Masyarakat dalam Proses Demokratisasi di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Publika*, 10(1).
- Rahmawati, A., Ansari, M. I., & Parawangi, A. (2020). Implementasi Kebijakan Program Pengembangan Komoditas Pada Kawasan Strategi Kabupaten Di Kabupaten Bone. *Kajian Ilmiah Mahasiswa Administrasi Publik (KIMAP)*, 1(1), 218-231.
- Suharno.(2010). Dasar-Dasar Kebijakan Publik: Kajian Proses & Analisis. *Kebijakan Publik*.
- Sulaeman, M., & Ahmad, N. (2020). Penanggulangan Kemiskinan Melalui Program Kartu Keluarga Sejahtera. *Jurnal Pilar*, 11(2).
- Ulfa. (2020). Implementasi Kebijakan Program Kartu Keluarga Sejahtera di Kabupaten Luwu.

Jurnal Administrasi Publik,
3(2).

Wahyudi, D., & Rejekiingsih, T. W.
(2013). Analisis Kemiskinan di
Jawa Tengah. *Diponegoro
Journal of Economics* 2(1).

Wanto, A. H. (2017). Strategi
Pemerintah Kota Malang dalam
Meningkatkan Kualitas
Pelayanan Publik. *Journal of
Public Sector Innovations*, 4-5.

Peraturan/Undang Undang

Peraturan Gubernur Jawa Tengah
Nomor 40 Tahun 2017 Tentang
Bantuan Jaminan Sosial Bagi
Fakir Miskin yang Tidak
Produktif melalui Kartu Jawa
Tengah Sejahtera.

Undang Undang Nomor 13 Tahun 2011
Tentang Penanganan Fakir
Miskin.

Wawancara

Wawancara dengan Camat Kabupaten
Kendal 2 November 2022

Wawancara dengan Pegawai Dinas
Sosial Provinsi Jawa Tengah 2
November 2022